

Analisis Perbandingan Metode Istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam Masalah *Khilāfiyyah* (Bab Taharah)

Comparative Analysis of Legal Reasoning Methods in the Hanafi and Maliki Schools on Disputed Issues in the Chapter of Taharah (Ritual Purification)

Mufadhal,^a Aswanto Muhammad Takwi Hede,^b Awal Rifai^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: mufadhal96@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: aswanto@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 24 Oktober 2025

Accepted: 27 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Hanafi School, Maliki School, legal reasoning, taharah, Khilāfiyyah, Islamic jurisprudence

Kata kunci:

Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, istinbat hukum, taharah, Khilāfiyyah, fikih.

Abstract

This study falls within the discourse of comparative Islamic jurisprudence (*fiqh muqāran*), particularly analyzing the methods of legal derivation (*istinbāt al-hukm*) in the Hanafi and Mālikī schools concerning the chapter of *tahārah* (purification). The objective of this research is to examine how each school establishes legal rulings based on their respective *usūl al-fiqh* methodologies, identify their core differences, and reveal the jurisprudential implications in *khilāfiyyah* (legal disagreement). Employing a qualitative-descriptive method and library research approach, this study analyzes classical sources such as *Badā'i'*, *al-Sanā'i'*, *Al-Mudawwanah*, *Al-Muwatta'*, and foundational texts in both schools' legal theories. The findings reveal that the Hanafi school adopts a rational approach grounded in *qiyyās* and *istihsān*, while the Mālikī school emphasizes the practice of the people of Madinah ('amal Ahl al-Madinah) and considerations of *maslahah*. These differences result in divergent legal outcomes on issues such as the obligation of intention in ablution and bathing, maximum menstruation period, the timing of *tayammum*, and the necessity of removing impurities. This research contributes to the field of *usūl al-fiqh* by offering a comparative framework that aids in understanding contemporary legal disagreements within Islamic jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup diskursus fikih perbandingan (*fiqh muqāran*), khususnya dalam menganalisis metode istinbat hukum antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam bab taharah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penetapan hukum berdasarkan pendekatan *usūliyyah* oleh mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, menjelaskan perbedaan pokok di antara keduanya, serta mengungkap dampak dari perbedaan tersebut terhadap permasalahan fikih *khilāfiyyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis teks klasik seperti *Badā'i'*, *al-Sanā'i'*, *Al-Mudawwanah*, *Al-Muwatta'*, dan referensi usul fikih dari kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan rasional berbasis kias dan istihsan, sedangkan mazhab Maliki lebih menekankan '*amal Ahlu al-*

Madīnah dan pertimbangan *maṣlahah*. Perbedaan ini memunculkan variasi dalam persoalan seperti niat dalam wudu dan mandi, batas maksimal haid, tayammum, dan penghilangan najis. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian usul fikih mazhab dengan menghadirkan pemetaan komparatif yang aplikatif dalam memahami *khilāfiyyah* kontemporer.

How to cite:

Mufadhal, Aswanto Muhammad Takwi Hede, Awal Rifai, "Analisis Perbandingan Metode Istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam Masalah *Khilāfiyyah* (Bab Taharah)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 48-72. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2489



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama sempurna memberi perhatian besar pada kebersihan fisik dan spiritual. Secara bahasa, taharah berarti bersih dari kotoran. Dalam istilah syariat, taharah adalah upaya menghilangkan hal yang menghalangi sahnya salat, seperti hadas atau najis, menggunakan air atau debu bila air tidak tersedia.¹

Dalam Islam, taharah meliputi penyucian fisik dan hati. Penyucian hati dilakukan dengan menjauhi penyakit hati lewat tauhid dan taubat, sedangkan penyucian fisik dilakukan dengan wudu, mandi, dan membersihkan najis. Kedua aspek ini saling menyempurnakan dalam keimanan. Nabi Muhammad saw. Bersabda:

الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²

Artinya:

Taharah adalah separuh dari iman. (H.R. Muslim)

Taharah tak sekadar kebersihan fisik, melainkan menjadi syarat utama sahnya ibadah, terutama salat sebagai rukun Islam. Al-Qur'an pun menegaskan perintah menjaga kesucian jasmani dan rohani. Di antaranya firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri.³

¹‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *Al-Mugnī*, ed. ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turkī dan ‘Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Hulū, juz 1 (Cet. III; Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 12.

²Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 1 (Cet. I Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1433 H/2012 M), h. 203.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihān Mushaf Al-Qur'an, 1440 H/2019 M), h. 47.

Kedudukan taharah sangatlah penting karena ia merupakan pintu awal bagi diterimanya ibadah seorang hamba. Nabi Muhammad saw. Bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴

Artinya:

Salat tidak akan diterima tanpa bersuci. (H.R. Muslim)

Meski kewajiban taharah diakui bersama, ulama berbeda pandangan dalam detail hukumnya akibat variasi metode pengambilan hukum di tiap Mazhab. Keragaman ini penting dalam studi perbandingan, seperti antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Al-Syātibī menjelaskan bahwa perbedaan yang berlandaskan istinbat dan dalil yang valid adalah hal lumrah.⁵ Perbedaan ini pada dasarnya bukan bentuk pertentangan, melainkan representasi keluasan syariat Islam dan fleksibilitasnya dalam menjawab berbagai kondisi masyarakat dan perubahan zaman.

Dalam fikih Islam, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki memiliki metode penafsiran dalil yang berlainan. Mazhab Hanafi cenderung rasional dan mengutamakan kias serta *istihsān*, sebagaimana dijelaskan Imam Sarakhsī dalam *Uṣūl al-Sarakhsī*.⁶ Sedangkan Mazhab Maliki memiliki pendekatan tradisionalistik yang kuat dengan menjadikan ‘*amal ahlu al-Madīnah* sebagai salahsatu sumber hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn al-Qāsim dalam *al-Mudawwanah*.⁷ Perbedaan cara menafsirkan dalil menyebabkan variasi pandangan fikih, salah satunya dalam taharah. Karena itu, mengkaji metode istinbat kedua Mazhab besar ini sangat penting bagi mahasiswa syariah dan akademisi, agar bersikap adil dan tidak fanatik pada satu pendapat.

Berangkat dari keterangan tersebut maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam masalah *Khilāfiyyah* pada bab taharah?, Bagaimana perbedaan metode istinbat yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam masalah *Khilāfiyyah* pada bab taharah?

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam bab taharah, serta menjelaskan perbedaan pokok antara metode istinbat kedua Mazhab tersebut, serta mengungkap dampak dari perbedaan metode tersebut dalam bentuk permasalahan fikih *Khilāfiyyah*.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan komparatif-maqashidi terhadap metode istinbat hukum antara dua Mazhab, menggunakan studi pustaka (library research) atas kitab-kitab usul fikih dan fikih klasik dari Mazhab Hanafi dan Maliki. Sumber data dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, buku-buku, artikel ilmiah, serta berbagai referensi pustaka lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang

⁴ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 1 (Cet. I ; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1433 H/2011 M), h. 140.

⁵ Abū Ishaq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Cet. Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997), h. 136.

⁶ Abū Bakr al-Sarakhsī, *Uṣūl al-Sarakhsī*, (Cet. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993 M), h. 5.

⁷ Sahnūn bin Sa'īd, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Cet. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M), h. 19.

digunakan adalah pendekatan doktrinal-komparatif, yaitu pendekatan yang membandingkan teori istinbat fikih. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan pendekatan komparatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menelaah data dari aspek-aspek yang bersifat umum terlebih dahulu, kemudian disimpulkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik dan terperinci.⁸ Sehingga peneliti bisa mengetahui secara mendalam mengenai judul yang berkaitan dengan penelitian.

Sebuah kajian sebelumnya juga telah membahas mengenai metode istinbat hukum para imam Mazhab. Riki Dian Saputra⁹ dalam makalahnya yang berjudul ‘Imam Mazhab dan Metode Istinbat Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) dan Analisis Sebab dan Ikhtilaf’ membahas metode istinbat empat mazhab, sedangkan penelitian ini fokus membandingkan metode istinbat Hanafi dan Maliki dalam masalah khilafiyah bab taharah. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Adiah, Halimatus, dan Muhammad Sibawaih. “Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik.”¹⁰ Jurnal tersebut membahas secara umum tentang metode ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik, sedangkan penelitian ini bersifat komparatif, membandingkan metode istinbat Hanafi dan Maliki dalam masalah khilafiyah bab taharah.

Meski kajian terdahulu telah membahas metode istinbat empat Mazhab secara umum, fokusnya belum secara khusus menelaah perbandingan metode istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam masalah *Khilāfiyyah*, terutama di bab taharah. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam metode istinbat kedua Mazhab, membandingkan pendekatannya, dan menjelaskan dampak perbedaan metode terhadap realitas *Khilāfiyyah* yang berkembang. Studi ini bertujuan memperluas wawasan fikih dengan menelaah metode istinbat dua Mazhab berpengaruh, serta diharapkan menjadi rujukan ilmiah dan mendorong sikap toleran terhadap perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Istinbat Hukum dalam Islam

Kata istinbat berasal dari akar kata *nabaṭa*, yang secara bahasa berarti air yang memancar dari dasar sumur ketika pertama kali digali.¹¹ Dari makna ini berkembang arti istinbat sebagai proses mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi, seperti ilmu, hukum, atau informasi.

Istinbat yaitu memperoleh atau menyimpulkannya dari prinsip umum, atau melalui proses berpindahnya pikiran dari suatu premis atau beberapa premis yang

⁸Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI) STIBA Makassar, (Makassar: STIBA Publishing, 2024), h. 37.

⁹Riki Dian Saputra. "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf." *Pa-Bengkayang. Go. Id* 4, no. 1 (2021).

¹⁰Adiah, Halimatus, and Muhammad Sibawaih. "Metode ijtihad imam abu hanifah dan imam malik." *Jurnal cerdas hukum* 1.1 (2022): 89-99.

¹¹Muhammad ibn Mukarram ibn 'Alī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, juz 7 (Cet. III; Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H). h. 410.

menjadi dasar kepada suatu kesimpulan lain sebagai hasil, sesuai dengan kaidah-kaidah logika.¹² Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/ 4: 83:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْحُرْفِ أَدَعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ
لَعِلَّمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Terjemahnya:

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Padahal kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan kepada Ulil Amri di antara mereka, tentu orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran (yang mampu mengistinbathnya) dari mereka akan mengetahuinya.¹³

Menurut ahli bahasa seperti al-Zajjāj, makna *yastanbiṭūnahu* adalah *yastakhrijūnahu* (mengeluarkan atau mengekstrak), sebagaimana air yang keluar dari kedalaman tanah.¹⁴ Dengan demikian, istinbat mencerminkan usaha mendalam untuk menemukan kandungan hukum dari dalil syariat, baik dari Al-Qur'an, sunah, maupun sumber lainnya.

Al-Qur'an dan Sunah menjadi dasar hukum Islam, yang menyampaikan aturan secara langsung maupun tidak. Bila muncul pertentangan dalil, ilmu uṣūl fikih menawarkan metode istinbat, yaitu menelaah bahasa, memahami tujuan hukum, dan mencari penyelesaian terhadap dalil-dalil yang tampaknya bertentangan.¹⁵

Seorang ulama berkewajiban memulai pencarian hukum dari Al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan, dilanjutkan dengan Sunah, kemudian dikaji pendapat yang disepakati atau diperselisihkan para ulama. Dalam perkara yang diperselisihkan, ia mempertimbangkan argumen masing-masing. Jika tak ada ketetapan, hukum ditetapkan melalui istinbat dengan kias serta dalil lain. Secara umum, terdapat dua puluh dalil, baik yang disepakati maupun diperselisihkan, seperti Al-Qur'an, sunah, ijma'k, syariat terdahulu, kias, *istihsān*, maslahat, *saddu al-Žarā'i*, dan adat.¹⁶

1. Tinjauan Umum Mazhab Hanafi

Imam Abū Ḥanīfah Abū Ḥanīfah al-Nu'mān ibn Thābit ibn Zūtā ibn Marzubān al-Tamīmī al-Kūfī (80 H) merupakan pelopor fikih yang berbasis nalar dan antisipatif, dengan merumuskan hukum atas kasus-kasus yang belum terjadi. Tujuannya agar hukum tersedia saat kasus muncul di masa depan, sehingga cakupan fikih meluas. Mazhab Hanafi

¹²Ahmad Mukhtār ‘Abd al-Hamīd ‘Umar, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣirah*, juz 3 (Cet. I; Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M). h. 2159.

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M), h. 122.

¹⁴Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Alī, Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, juz 7 (Cet. III; Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H). h. 410.

¹⁵Ratna Wijayanti, dan M. Meftahudin. "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh tentang produk halal, metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan hukum produk halal." *International Journal Ihya 'Ulum al-Din* 20, no. 2 (2018). h. 256.

¹⁶Abū al-Qāsim Muhammad ibn Aḥmad ibn Juzzayy al-Kalbī, *Taqrīb al-Wuṣūl ilá ‘Ilm al-Uṣūl*, (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M). h. 176.

dikenal responsif terhadap dinamika sosial melalui metode istinbat yang berurutan: Al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat, ijmak, kias, dan *istihsān*.¹⁷

Mazhab Hanafi tumbuh pesat di Irak dan Suriah, lalu menyebar ke Afganistan, anak benua India, dan Asia Tengah. Pada era Turki *Saljūq* dan khususnya Daulat Uṣmāniyyah, Mazhab ini memperoleh pengakuan resmi sebagai dasar sistem peradilan dan pengangkatan *qādī*. Namun, di wilayah seperti Mesir, Mazhab lain tetap lebih dominan di kalangan masyarakat.¹⁸

2. Tinjauan Umum Mazhab Maliki

Imam Mazhab Maliki adalah *hujjah* (sandaran) umat, Imam dari *Madīnah al-Munawwarah*, bahkan imam bagi dua tanah suci (Makkah dan Madinah), yang masyhur di dua negeri, yaitu *Hijāz* dan dua wilayah Irak, serta tersebarnya Mazhabnya di belahan barat dan timur dunia. Beliau adalah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir bin ‘Amr bin al-Hārith bin Ghaymān bin Khutail bin ‘Amr bin al-Hārith, Dzū Aṣbahāl-Aṣbahāl al-Himyarī, Abū ‘Abdillah al-Madanī.¹⁹

Mazhab Maliki berakar di Madinah, kemudian berkembang ke berbagai kawasan, termasuk *Hijāz*, Irak, *Khurāsān*, Mesir, Syam, Persia, Maroko, Afrika Utara, dan Andalus. Penyebarannya didukung tokoh-tokoh terkemuka seperti Abū Qurrah, Ibn al-Mahdī, dan Sahnūn. Di beberapa daerah, pengaruhnya kemudian bersaing dengan Mazhab lain, seperti Mazhab Hanafi dan Syafii. Di Andalus, Mazhab ini memperoleh legitimasi resmi di bawah pemerintahan Hisyām ibn ‘Abdurrahmān dan menjadi Mazhab satu-satunya yang dominan, sementara Mazhab lain tidak berhasil berkembang signifikan.²⁰

Dalam merumuskan hukum fikih, Imam Malik merujuk kepada Al-Qur'an, hadis, ijmak, kias, praktik penduduk Madinah, *Maṣlaḥah Mursalah* (maslahat), *'urf* (tradisi), dan *Saddu al-Żarā'i* (upaya pencegahan). Salahsatu hal yang membantu perkembangan Mazhab Maliki yakni pemikiran Imam Malik yang terkodifikasi dengan baik.²¹

Berikut ini adalah komparasi usul istinbat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki:

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki
Sumber Utama	Al-Qur'an, hadis, ijmak, kias	Al-Qur'an, hadis, ijmak, 'amal Ahlu al-Madīnah, Kias

¹⁷Adiah, Halimatus, and Muhammad Sibawaih. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik." (*Jurnal Cerdas Hukum* 1, no.1 2022). h. 95.

¹⁸Dewi Mustika Ningrat, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Mazhab Hanafi", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020), h. 18.

¹⁹Mālik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa'*, (Cet. I; Abū Ṣabī: Mu'assasat Zāyid ibn Sultān Āl Nahyān li al-A'māl al-Khayriyyah wa al-Insāniyyah, 1425 H/2004 M). h. 17.

²⁰Abū al-Faḍl al-Qādī 'Iyād ibn Mūsā, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik*, juz 1 (Cet. I; Maroko: Matba'at Fadālah, 1965–1983 M). h. 24-31.

²¹Nabel Salma Nazela, dan Nor Aliya Rahmi. "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab." *Islamic Education* 1, no.1 (2023): h. 74.

Pendekatan Rasional	Sangat menonjol menggunakan <i>ra'y</i> , kias, <i>istihsān</i> , <i>istishlāh</i> untuk fleksibilitas hukum	Mengakui rasionalitas (<i>istislāh</i>) tetapi lebih mengutamakan tradisi Madinah dan amalan salaf
<i>Istihsān</i>	Dipakai luas sebagai metode mengutamakan kemaslahatan dibanding kias yang kaku	Jarang digunakan lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah dan <i>maṣlahah mursalah</i> dan dalil yang kuat
'Amal Ahlu al-Madīnah	Tidak dijadikan dalil independen	Dijadikan hujah utama karena diyakini mencerminkan sunnah Nabi saw. yang diamalkan kolektif
Hadis <i>Āḥād</i>	Selektif, hadis <i>āḥād</i> juga diterima dengan syarat	Diterima jika sahih dan tidak bertentangan dengan amal penduduk Madinah
'Urf (Adat Kebiasaan)	Diakui sebagai dasar hukum jika tidak melanggar nas	Diakui tetapi derajatnya di bawah amalan penduduk Madinah
<i>Maṣlahah Mursalah</i>	Diakui secara terbatas	Lebih terbuka menggunakan <i>maṣlahah mursalah</i> jika sesuai <i>maqāsid syar'iyyah</i>
Kaidah Umum	Fleksibel, menekankan kemudahan dan kebutuhan masyarakat	Kombinasi tekstual dan tradisi Madinah, dengan pertimbangan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dalil

Tinjauan Umum Tentang Masalah *Khilāfiyyah*

1. Pengertian *Khilāfiyyah*

Secara bahasa, *khilāfah* adalah perbedaan atau pertentangan. Istilah ini merujuk pada perselisihan atau perbedaan pendapat antara dua pihak, dalam rangka menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan.²² Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Āli 'Imrān/ 3: 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Terjemahnya:

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah ber cerai berai.²³

Para sahabat pun kerap berselisih dalam masalah *furū'*, namun tetap bersatu dalam menghadapi musuh Islam. Adapun fitnah yang menimpa 'Alī ibn Abī Tālib ra. merupakan

²² Ahmad Mukhtār 'Abd al-Hamīd 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, juz 1 (Cet. I; Kairo: 'Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M). h. 685.

²³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 84.

perpecahan tercela, meskipun kebanyakan sahabat yang terlibat bertindak atas dasar penafsiran ijtihadi, bukan dorongan hawa nafsu, sehingga tetap dihormati.²⁴

2. Faktor-Faktor Penyebab *Khilāfiyyah*

Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Khilāfiyyah*:

- a. Perbedaan muncul karena variasi dalam memahami makna kata-kata. Terkadang, ada teks yang secara lahiriah berbeda satu sama lain sehingga diperlukan solusi yang dapat mengakomodasi keduanya. Pada titik inilah para ulama kadang berbeda dalam menentukan cara penyelesaiannya. Hal ini merupakan masalah yang luas, disebabkan oleh penggunaan kata-kata yang jarang dipakai, kata-kata yang memiliki makna ganda, serta adanya penggunaan majas (kiasan) selain makna sebenarnya. Selain itu, perbedaan dalam huruf juga bisa memengaruhi arti kata yang digunakan.²⁵
- b. Para ahli hadis sering memiliki pandangan yang berbeda tentang tingkat keaslian sebuah hadis. Ada ahli hadis yang menganggap hadis tersebut sahih, tetapi ada juga yang menilai hadis itu tidak sahih. Karena perbedaan penilaian ini, kesimpulan hukum yang diambil dari hadis tersebut sangat tergantung pada bagaimana para ahli menilainya.²⁶
- c. Terjadinya pertentangan antar dalil dalam suatu kaidah sering kali menjadi sebab perbedaan pendapat. Sebagian ulama menerima dalil tertentu sebagai dasar suatu kaidah, sementara yang lain menolaknya. Akibatnya, muncul perbedaan di antara para ulama dalam menentukan ayat mana yang bersifat global dan mana yang terikat, begitu pula dalam membedakan antara ayat yang bersifat umum dan yang khusus.²⁷
- d. Perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam menerapkan metode atau pendekatan istinbat hukum setelah merujuk pada sumber-sumber syariat yang disepakati sering kali menjadi sebab munculnya *khilāf*. Contohnya, sebagian ulama mengakui keabsahan *syar‘u man qablana* (Hukum syariat dari umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad saw.) sebagai hujah, sementara sebagian lainnya menolaknya. Begitu pula, ada Mazhab yang menjadikan istihsān sebagai metode hukum yang sah, sedangkan yang lain tidak menganggapnya dapat dijadikan dasar penetapan hukum.²⁸

Metode Istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

1. Metode Istinbat Dalam Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berlandaskan Al-Qur'an, hadis, ijmak, kias, dan istihsan. Abū Hanīfah memulai penetapan hukum dari Al-Qur'an, lalu hadis, pendapat sahabat, dan bila tiada dalil, beliau berijtihad sendiri sesuai prinsip syariat. Dengan demikian, metode istinbat Abū Hanīfah dimulai dari Al-Qur'an, lalu hadis sahih yang masyhur di kalangan orang-orang terpercaya, dilanjutkan dengan pendapat sahabat. Bila semua itu tidak

²⁴Abū Muḥammad ‘Abd al-Haqq ibn Ghālib ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Tammām Ibn ‘Atīyyah, *al-Muhrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, juz 1 (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 H). h. 484.

²⁵Riki Dian Saputra. "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf." *Pa-Bengkayang. Go. Id* 4 no.1 (2021): h. 15.

²⁶M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Ikhtilaf NU-Muhammadiyah* (Wonosobo: E-book, 2012), h. 14-15.

²⁷Abd al-Wahab Abd al-Salam Thawilah, *Atsarū Al-Lughah Fi Ikhtilaf al-Mujtahidin* (Cet. I; Kairo: Dar al-Salam, 1414 H/1993 M), h. 67.

²⁸Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islamiy*, Juz 1 (Cet: I; Damaskus: Dar al Fikr, 1406 H/1986 M), h. 417.

memberikan solusi, barulah beliau menggunakan metode ijtihad dengan kias dan istihsan untuk menetapkan hukum. Ini dikenal sebagai *uṣūl al-kubrā*, yakni prinsip-prinsip utama dalam penetapan hukum fikih.²⁹

2. Metode Istinbat dalam Mazhab Maliki

Mazhab Maliki adalah Mazhab yang berasal dari penduduk Madinah. Madinah dikenal sebagai kota Nabi, tempat hijrah, pusat penyebaran sunah, dan tempat tegaknya Islam. Pendapat para ulama Madinah pada masa sahabat, tabiin, dan *tābi'u tabiin* dianggap sebagai yang paling kuat dibandingkan pendapat penduduk kota-kota Islam lainnya, baik dalam hal pokok ajaran (usul) maupun cabang-cabang hukum (furuk).³⁰

Mazhab Maliki kemudian meluas ke berbagai kawasan dunia Islam. Bahkan pada masa Imam Mālik masih hidup, Mazhab ini telah dijadikan Mazhab resmi negara Andalusia oleh penguasa Hisyām bin ‘Abd al-Rahmān bin Mu‘awiyah. Seluruh penduduk diarahkan mengikuti Mazhab Maliki, dan hukum serta fatwa negara disesuaikan dengan pendapat Imam Mālik. Kebijakan ini mulai diberlakukan sekitar tahun 170 H, menjelang akhir hayat beliau.³¹ Di wilayah Afrika, Sahnun berperan penting dalam memperkuat dan meneguhkan keberadaan Mazhab Maliki.³² Sementara itu, di Mesir, peran dan perjuangan Ibn al-Qāsim berhasil memperkuat dan menyebarluaskan Mazhab ini.³³

Imam Mālik tidak menyusun secara sistematis prinsip dan metode istinbat Mazhabnya. Sebagian dasar beliau sebutkan secara eksplisit, sebagian lain hanya diisyaratkan. Prinsip-prinsip utama Mazhab Maliki kemudian dirumuskan dari pernyataan beliau, petunjuk tidak langsung, kajian ulama *Mālikiyah* terhadap fatwa-fatwa beliau, serta kandungan *al-Muwatta'*. Prinsip-prinsip tersebut termaktub dalam kitab *al-Muwāfaqāt*.³⁴

Perbandingan Metode Istinbat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki (Bab Taharah)

Pada bagian ini, peneliti membahas pokok kajian, yakni perbandingan metode istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki dalam menghadapi sejumlah masalah *Khilāfiyyah* di bab taharah. Pembahasan disusun mengikuti sistematika fikih klasik yang mencakup wudu, mandi wajib, haid, tayamum, dan pensucian najis. Untuk menjaga fokus dan kedalaman, peneliti hanya memilih satu contoh masalah *Khilāfiyyah* dari setiap topik.

²⁹Saputra, Riki Dian. "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf." (*Pa-Bengkayang*, 2021), h. 7.

³⁰Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taymiyyah, *Majmū‘ Fatāwā*, disusun dan disusun ulang oleh ‘Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Qāsim, dibantu oleh putranya Muḥammad, juz 20 (Cet. Al-Madīnah al-Munawwarah: Majma‘ al-Malik Fahd li-Tibā‘at al-Muṣṭafā al-Sharīf, 1425 H/2004 M). h. 294.

³¹Iyād bin Mūsá al-Yahṣubī al-Sabtī, *Tartīb al-Madārik wa-Taqrīb al-Masālik li-Ma‘rifat A‘lām Madhhāb Mālik*, tahqīq: Aḥmad Bakīr Maḥmūd, juz 1 (Cet. Bairūt: Dār Maktabat al-Ḥayāh; Tarābulus: Dār Maktabat al-Fikr, 1387 H/1967 M). h. 55.

³²Ibrāhīm bin ‘Alī bin Muḥammad Ibn Farḥūn al-Yamārī, *al-Dībāj al-Mudhab fī Ma‘rifat A‘yān ‘Ulamā’ al-Madhhāb*, tahqīq dan ta‘līq: Muḥammad al-Aḥmadī Abū al-Nūr, juz 2 (Cet. Kairo: Dār al-Turāth li-al-Tibā‘ah wa-al-Nashr, t.th.). h. 30.

³³Ibrāhīm bin ‘Alī al-Shīrāzī, *Tabaqāt al-Fuqahā’*, dihimpun dan diringkas oleh Muḥammad bin Mukarram Ibn Manzūr, tahqīq: Iḥsān ‘Abbās (Cet. I; Bairut: Dār al-Rā‘id al-‘Arabī, 1390H/1970 M). h. 150.

³⁴Ibrāhīm bin Mūsá al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, tahqīq: Abū ‘Ubaydah Mashhūr bin Ḥasan Āl Salmān, taqdīm: Bakr bin ‘Abd Allāh Abū Zayd, juz 4 (Cet. I; al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1417 H/1997 M). h. 143

Pemilihan ini dilakukan secara terarah dan proporsional, dengan mempertimbangkan urgensi masalah, kejelasan perbedaan metode istinbat, serta keterbatasan ruang kajian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberi gambaran representatif mengenai karakter istinbat kedua Mazhab, sekaligus tetap memberikan kontribusi ilmiah meskipun cakupannya terbatas.

1. Bab Wudu

Pendapat Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang Hukum Niat dalam Wudu

Para ulama telah sepakat bahwa niat merupakan syarat dalam setiap ibadah. Kesepakatan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Bayyinah/98: 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين

Terjemahnya:

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya.³⁵

Serta sabda Nabi Muhammad saw. yang masyhur:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ (رواه مسلم)³⁶

Artinya:

Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. (H.R. Muslim)

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang apakah niat merupakan syarat sah dalam wudu itu sendiri atau tidak. Perbedaan ini muncul karena wudu, selain sebagai ibadah, juga memiliki sisi sebagai tindakan fisik yang bisa dilakukan tanpa disertai niat, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan fukaha.³⁷ Khususnya dalam pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki sebagai berikut:

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī menyebutkan dalam kitabnya *Badā'i' al-Sanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*

وَأَمَّا النِّيَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ الشَّرَائِطِ، وَكَذَلِكَ التَّرْتِيبُ فَيَجُوزُ الْوُضُوءُ بِدُونِ النِّيَةِ وَمُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ

عِنْدَنَا³⁸

Artinya:

Adapun niat, maka ia bukan termasuk syarat-syarat (wudu), demikian pula tertib (berurutan) maka sah wudu tanpa niat dan tanpa memperhatikan tertib menurut kami Mazhab Hanafi.

2. Pendapat Mazhab Maliki

Pendapat Mālik bin Anas al-Asbahī disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah*

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihān Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 904.

³⁶Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 6 (Cet. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H). h. 48.

³⁷Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, juz 1 (Cet. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1425 H/2004 M). h. 15.

³⁸Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Sanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, juz 1 (Cet. I; Mesir: Matba'at Sharikat al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1327 H). h. 17-18.

وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ حَرِّ يَجْدُهُ أَوْ تَحْوِي ذَلِكَ وَلَا يَنْوِي الْوُضُوءُ لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ فَلَا يُبْرِئُهُ مِنْ وُضُوءٍ
لِالصَّلَاةِ وَلَا مِنْ مَسَنِ الْمُصْحَفِ وَلَا التَّانِفَلَةِ وَتَحْوِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَكُونُ الْوُضُوءُ عِنْدَ مَالِكٍ
إِلَّا بِيَنِيَّةٍ قُلْتُ: فَإِنْ تَوَضَّأَ وَبَقَيَ رِجْلَاهُ فَخَاضَ نَهْرًا أَوْ مَسَحَ بِيَدِيهِ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ إِلَّا أَنَّهُ يَنْوِي
بِتَحْوِيَضِهِ غَسْلَ رِجْلَيْهِ؟ قَالَ: لَا يُبْرِئُهُ هَذِهِ³⁹

Artinya:

Imam Mālik berpendapat bahwa wudu yang dilakukan semata-mata karena sebab duniawi, seperti merasa panas, tanpa niat ibadah, tidak sah digunakan untuk salat, menyentuh mushaf, atau ibadah lain. Ibn al-Qāsim menegaskan bahwa menurut Mālik, wudu hanya sah dengan niat. Jika seseorang belum membasuh kakinya lalu mencelupkannya ke air atau menyapunya tanpa niat membasuh bagian wudu, tindakan tersebut tidak sah dan tidak menyempurnakan wudunya.

Metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Niat Dalam Wudu

1. Metode Istinbat Mazhab Hanafi.
Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syamsu al-A'immah al-Sarakhsī menyebutkan dalam kitabnya *al-Mabsūt*.⁴⁰

a. Al-Qur'an

وَلَنَا آيَةُ الْوُضُوءِ فَفِيهَا تَنْصِيصٌ عَلَى الْغَسْلِ، وَالْمَسْحِ، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِدُونِ النِّيَّةِ فَإِشْرَاطُ
النِّيَّةِ يَكُونُ زِيادةً عَلَى النَّصِّ إِذْ لَيْسَ فِي الْفَظْطِ الْمَنْصُوصِ مَا يَدْلُلُ عَلَى النِّيَّةِ

Artinya:

Adapun dalil bagi kami adalah ayat wudu, di mana disebutkan secara tegas tentang perintah mencuci dan mengusap, dan semua itu bisa terwujud tanpa adanya niat. Maka, mensyaratkan niat adalah penambahan terhadap nas, karena dalam lafadz yang ditetapkan (dalam Al-Qur'an) tidak terdapat petunjuk yang menunjukkan adanya keharusan niat.

Wajh al-Istidlāl: Penalaran literal (*zāhir*) terhadap teks ayat tanpa menambah makna yang tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam ayat hanya disebutkan perintah mencuci dan mengusap tanpa menyebut niat. Maka, mensyaratkan niat dianggap sebagai tambahan atas nas yang tidak diperbolehkan.

b. Kias

فَإِذَا عَمِلَ الْمَاءُ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ بِدُونِ النِّيَّةِ فَفِي إِزَالَةِ الْحَدَثِ الْحَلْكُ مِنْ أَوْلَى

Artinya:

Jika air bisa menghilangkan najis yang bersifat '*ainiyah* (fisik) tanpa niat, maka lebih-lebih lagi ia dapat menghilangkan hadas yang bersifat tidak tampak tanpa niat.

³⁹Mālik bin Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah*, juz 1 (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). h. 137.

⁴⁰Muhammad ibn Aḥmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, juz 1 (Cet. Mesir: Maṭba'at al-Sa'ādah, t.t), h. 72.

Wajh al-Istidlāl: Analogi antara dua hukum berdasarkan kesamaan fungsi air sebagai pembersih. Jika air bisa menghilangkan najis nyata tanpa niat, maka lebih utama bahwa air juga bisa menghilangkan hadas (yang abstrak) tanpa niat, karena keduanya sama-sama bentuk pembersihan.

c. Istihsan

وَنَحْنُ نُسَلِّمُ أَنَّ الْوُضُوءَ بِعِيْرِ نِيَّةٍ لَا يَكُونُ عِبَادَةً، وَلَكِنَّ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فِيهَا تَبَعُّ غَيْرُ⁴¹
مَفْصُودٍ إِنَّمَا الْمَفْصُودُ إِزَالَةُ الْحَدَثَ

Artinya:

Dan kami mengakui bahwa wudhu tanpa niat tidaklah menjadi ibadah. Namun makna ibadah di dalamnya adalah makna ikut (*tābi'*) yang tidak dimaksudkan secara langsung. Yang dimaksud secara utama hanyalah menghilangkan hadas.

Wajh al-Istidlāl: Pendekatan (makna rasional) dan perbedaan antara tujuan pokok dan ikutan (*maqsūd* dan *tābi'*). Ibadah dalam wudu bersifat sekunder, karena yang menjadi tujuan utama adalah taharah dari hadas. Maka niat tidak menjadi syarat mutlak.

2. Metode Istinbat Mazhab Maliki.

Pendapat Mālik bin Anas al-Asbahī disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah*.⁴²

a. Sunah

وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya:

Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat.

Wajh al-Istidlāl: Pendekatan qawliyyah langsung dari Nabi, yang dijadikan dasar umum amal ibadah. Wudu termasuk amal ibadah, maka ia masuk dalam keumuman hadis ini. Karena itu, niat adalah syarat agar amal tersebut sah secara syariat.

b. Kias

وَإِنْ تَوَضَّأَ يُرِيدُ صَلَاةً نَافِلَةً أَوْ قِرَاءَةً مُصْحَّفٍ أَوْ يُرِيدُ بِهِ طُهْرَ صَلَاةٍ فَذَلِكَ يُجْزِئُهُ

Artinya:

Dan jika seseorang berwudu dengan maksud untuk salat sunah, atau untuk membaca mushaf, atau ia bermaksud dengannya untuk bersuci demi salat, maka itu sudah mencukupinya (wudunya sah dan dianggap sah untuk ibadah).

Wajh al-Istidlāl: Kias dengan maksud penggunaan (*ta'lil al-a'māl*), bahwa niat menentukan fungsi syariat dari wudu. Kemaslahatan wudu hanya tercapai jika diniatkan untuk ibadah. Tanpa niat, ia hanya tindakan fisik biasa adat, bukan ibadah.

c. Pendapat Sahabat

وَبَلَغَنِي عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُطَهِّرُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَذْكُرْ عُسْنَلَةُ مِنْ الْجَنَابَةِ

Artinya:

⁴¹ Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī, Al-Mabsut, juz 1 (Cet. Mesir: Matba'at al-Sa'ādah, t.t), h. 72.

⁴² Mālik bin Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah*, juz 1 (Cet. ; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). h. 137.

Telah sampai kepadaku dari ‘Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkata: ‘Itu tidak akan menyucikannya hingga ia mengingat bahwa itu adalah mandi junub (mandi untuk mengangkat *janābah*).’

Wajh al-Istidlāl: Ittibā‘ atṣar saḥābah sebagai bagian dari dalil dan landasan hukum. Penetapan niat sebagai pembeda antara mandi adat dan mandi ibadah (*tahārah syar‘iyyah*) berasal dari praktik dan fatwa sahabat besar.

d. Amalan Penduduk Madinah

Dalam nukilan dari Ibn Wahb dan ‘Abdu al-Jabbār ibn ‘Umar dari Rabī‘ah, dapat disimpulkan adanya kebiasaan masyarakat Madinah dalam memandang niat sebagai syarat sah wudu dan mandi. Ini merupakan *hujjah* yang kuat dalam Mazhab Maliki.

Wajh al-Istidlāl: Amalan penduduk Madinah sebagai hujjah muktamad dalam Mazhab Maliki, dianggap *ijmak sukūtī* atau *ijmak ‘amalī*. Karena Madinah adalah pusat Islam awal, praktik kolektif mereka mencerminkan penerimaan Nabi saw. Maka, kewajiban niat dalam wudu diambil dari konsensus praktis ini.

2. Bab Mandi *Janābah*

Pandangan Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi tentang Hukum Niat Mandi *janābah*

Tidak terdapat *khilāf* di kalangan ulama tentang wajibnya mandi *janābah* bagi setiap orang yang telah diwajibkan melaksanakan salat. Telah disebutkan sebelumnya mengenai persyaratan niat untuk sahnya wudu. Dalam hal ini (mandi *janābah*), para ulama berbeda pendapat: apakah niat disyaratkan untuk sahnya mandi *janābah*? Berikut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī menyebutkan dalam kitabnya *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘ fī Tartīb al-Syarā‘i‘*

وَأَمَّا شُرُوطُهُ فَمَا ذَكَرْنَا فِي الْوُضُوءِ⁴³

Artinya:

Adapun syarat-syaratnya, maka sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam wudu (niat mandi *janābah* bukan syarat).

2. Pendapat Mazhab Maliki

Pendapat Mālik bin Anas al-Asbahī disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah*

وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَاحَةُ فَاغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ وَمَنْ يَنْوِي بِهِ عُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ اغْتَسَلَ مِنْ حَرَّ⁴⁴
يَجِدُهُ لَا يَنْوِي بِهِ عُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ اغْتَسَلَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ مَا لَمْ يَنْوِي بِهِ عُسْلَ الْجَنَابَةِ لَمْ يُجْزِ
ذَلِكَ مِنْ عُسْلِ الْجَنَابَ

Artinya:

⁴³ Abū Bakr ibn Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘ fī Tartīb al-Syarā‘i‘*, juz 1 (Cet. I; Mesir: Matba‘at Sharikat al-Matbu‘at al-‘Ilmiyyah, 1327 H). h. 34.

⁴⁴ Mālik bin Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah*, juz 1 (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). h. 137.

Imam Mālik berpendapat bahwa apabila seorang junub mandi tanpa niat mengangkat hadas besar, misalnya mandi untuk salat Jumat, karena panas, atau sebab lain, maka mandinya tidak sah sebagai mandi *janābah*.

Mazhab Hanafi fokus pada tindakan lahiriah, tidak mensyaratkan niat secara mutlak, sementara Mazhab Maliki fokus pada maksud ibadah, mewajibkan niat secara khusus agar sah.

Metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi tentang Hukum Niat Mandi *Janābah*

1. Metode Istinbat Mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat bukan syarat sah untuk mandi *janābah*, sebab tujuan utamanya adalah menghilangkan hadas, dan hal itu tercapai dengan menggunakan air meski tanpa niat. Niat hanya menjadi faktor penentu pahala ibadah, bukan syarat untuk keabsahan taharah. Berikut adalah pengelompokan metode istinbat dari Mazhab Hanafi yang disebutkan al-Sarakhsī dalam kitabnya *al-Mabsūt*.⁴⁵

a. Al-Qur'an

وَلَكَا آيَةُ الْوُضُوءِ فِيهَا تَنْصِيصٌ عَلَى الْعُسْلِ، وَالْمَسْحِ، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِدُونِ النِّيَةِ فَاشْتَرَطَ النِّيَةَ يَكُونُ زِيادةً عَلَى النَّصِّ إِذْ لَيْسَ فِي الْفُظُولِ الْمُنْصُوصِ مَا يَدْلُلُ عَلَى النِّيَةِ

Artinya:

Adapun dalil bagi kami adalah ayat wudu, di mana disebutkan secara tegas tentang perintah mencuci dan mengusap, dan semua itu bisa terwujud tanpa adanya niat. Maka, mensyaratkan niat adalah penambahan terhadap nas, karena dalam lafaz yang ditetapkan (dalam Al-Qur'an) tidak terdapat petunjuk yang menunjukkan adanya keharusan niat.

Wajh al-Istidlāl: Mazhab Hanafi menggunakan ayat wudu Q.S. Al-Mā'idah/5: 6 sebagai dalil untuk hukum mandi *janābah*, karena dalam ayat tersebut secara eksplisit disebut perintah untuk mandi (فَاطَّهِرُوا), dan tidak menyebut syarat niat. Maka mereka berpandangan bahwa niat bukanlah syarat sah mandi *janābah*, sebagaimana juga bukan syarat sah wudu menurut mereka.

b. Kias

فَإِذَا عَمِلَ الْمَاءُ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ بِدُونِ النِّيَةِ فَفِي إِزَالَةِ الْحَدَثِ الْحُكْمِيِّ أَوْلَى

Artinya:

Jika air bisa menghilangkan najis yang bersifat 'ainiyah (fisik) tanpa niat, maka lebih-lebih lagi ia dapat menghilangkan hadas yang bersifat tidak tampak tanpa niat.

Wajh al-Istidlāl: Hadas lebih ringan dari najis nyata. Analogi berbasis fungsi air sebagai pembersih.

2. Metode Istinbat Mazhab Maliki.

⁴⁵Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, (Cet. Bairut: Dar Al-Marafiq, t.t), h. 72.

Para ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa niat merupakan syarat sahnya mandi *janābah*. Berikut ini pengelompokan metode istinbat pendapat Mālik bin Anas al-Asbahī yang disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah*.⁴⁶

a. Sunah

وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya:

Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat.

Wajh al-Istidlāl: Semua amal (termasuk mandi) tergantung niat, sesuai bunyi lafaz umum hadis. Pendekatan *mafhūm ‘āmm* dan *tafsīr ibādī* terhadap ibadah mahdah.

b. Kias

وَهُوَ بِمُنْزِلَةِ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً فَلَا يُحِرِّئُهُ مِنْ فَرِيضَةٍ

Artinya:

Dan hal itu (mandi tanpa niat *janābah*) berada pada kedudukan seperti seseorang yang melaksanakan salat sunah, maka tidak mencukupi dari salat fardhu.

Wajh al-Istidlāl: Mengkiaskan mandi tanpa niat *janābah* dengan salat sunah yang tidak sah untuk salat wajib. Karena keduanya adalah ibadah mahdah, maka niat menjadi pembeda dan syarat validitas. Keduanya ibadah mahdah, maka niat adalah pemisah wajib. Kias *ta’līl* berdasarkan tujuan amalan.

c. Pendapat Sahabat

وَبَلَغَنِي عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُطَهِّرُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَذْكُرَ غُسْلَهُ مِنْ الْجُنَاحَةِ

Artinya:

Dan telah sampai kepadaku dari ‘Alī bin Abī Ṭālib bahwa beliau berkata: 'Itu tidak akan menyucikannya hingga ia mengingat bahwa itu adalah mandi untuk mengangkat *janābah*.

Wajh al-Istidlāl: Penegasan dari sahabat bahwa niat membedakan jenis mandi. Pegangan pada *ijmā‘* sahabah sebagai hujjah.

3. Bab Haid

Pandangan Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi tentang Waktu Maksimal Masa Haid

Kaum muslimin bersepakat bahwa darah yang keluar dari rahim terbagi menjadi haid, istihadah, dan nifas, serta bahwa haid bisa berlangsung hingga 10 hari. Namun, muncul perbedaan pandangan bila darah terus mengalir melebihi batas itu, apakah statusnya tetap haid atau menjadi istihadah, serta mengenai durasi maksimal haid, yang diperselisihkan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kāsānī menyebutkan dalam kitabnya *Badā'i‘ al-Ṣanā'i‘ fī Tartīb al-Sharā'i‘*.

⁴⁶Mālik bin Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah*, juz 1 (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). h. 137.

وَأَمَّا أَكْثُرُ الْحِيْضُور فَعَشْرَةُ أَيَّامٍ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا⁴⁷

Artinya:

Adapun batas maksimal haid adalah 10 hari, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab kami (Mazhab Hanafi).

2. Pendapat Mazhab Maliki

Pendapat Mālik bin Anas al-Asbahī disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah*

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا تَقْعُدُ أَيَّامٍ لِدَاهِنَّا عَنْ مَالِكٍ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا تَحْسِنُ النِّسَاءُ الدَّمْ خَمْسَ عَشْرَةً⁴⁸
لَيْلَةً

Artinya:

Dan telah dikatakan: Bawa wanita tersebut duduk (tidak mengerjakan salat dan puasa) selama hari-hari seperti (kebiasaan) wanita seumurnya, menurut pendapat Mālik, karena batas maksimal wanita menahan darah haid adalah lima belas malam.

Metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi Tentang Waktu Maksimal Masa Haid

1. Metode Istinbat Mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi menetapkan batas maksimal haid adalah 10 hari, dengan dasar Takwil terhadap hadis berdasarkan akal dan realitas biologis wanita, Ijmak sahabat sebagai penguat, menunjukkan metode istinbat mereka yang menekankan penggunaan akal (ra'y) dan berpegang teguh pada nash dan atsar, khas dalam mazhab ini. Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī menyebutkan dalam kitabnya *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*.⁴⁹

a. Hadis

وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الشَّطْرِ الْمَذُكُورِ النِّصْفَ لِأَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَكْهَا لَا تَقْعُدُ نِصْفَ عُمْرِهَا لَا تَرَى أَكْهَا لَا تَقْعُدُ حَالَ صِغْرِهَا، وَإِيَّاسِهَا، وَكَذَا زَمَانُ الطُّهُورِ يَزِيدُ عَلَى زَمَانِ الْحِيْضُورِ عَادَةً فَكَانَ الْمُرَادُ مَا يُقْرِبُ مِنَ النِّصْفِ، وَهُوَ عَشْرَةُ

Artinya:

Namun, yang dimaksud dengan separuh di sini bukanlah separuh secara literal, karena kita mengetahui secara pasti bahwa seorang wanita tidak duduk (meninggalkan salat dan puasa karena haid) selama separuh dari umurnya, sebab ia tidak mengalami haid pada masa kecil dan setelah ia mengalami putus haid (menopause). Selain itu, masa suci dalam kebiasaan umum lebih panjang daripada masa haid. Maka, yang dimaksud dengan separuh dalam hadis tersebut adalah waktu yang mendekati separuh, dan itu adalah 10 hari.

⁴⁷Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, juz 1 (Cet. I; Mesir: Matba'ah Sharikah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1327 H/1909 M), h. 40.

⁴⁸Mālik bin Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah*, juz 1 (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). h. 151.

⁴⁹Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, juz 1 (Cet. I; Mesir: Matba'ah Sharikah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1327 H/1909 M), h. 40.

Wajh al-Istidlāl: “Setengah” ditakwil sebagai perkiraan, karena tidak realistik secara biologis. Maka ditentukan 10 hari sebagai nilai moderat. Penafsiran tekstual dengan pendekatan akal (*ra'y*) dan kebiasaan.

b. Ijmak

وَلَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ الْمُشْهُورِ وَاجْمَاعِ الصَّحَابَةِ

Artinya:

Adapun dalil kami adalah hadis masyhur yang kami riwayatkan dan ijmak para sahabat.

Wajh al-Istidlāl: Ini memperkuat validitas hadis, meski sebagian ulama meragukan tercapainya ijmak *qat'i*. Argumen ini menunjukkan pendekatan Mazhab Hanafi yang sangat memprioritaskan *aṣar* sahabat sebagai otoritas hukum. Namun, penetapan ijmak pada batas durasi biologis bisa dikritik, sebab fakta biologis dapat bervariasi.

2. Metode Istibat Mazhab Maliki.

Mazhab Mālikī menetapkan bahwa maksimal masa haid adalah 15 hari, berdasarkan kias kehati-hatian, praktik ulama Madinah, pertimbangan maslahat, dan realitas biologis wanita. Ini menunjukkan metode istibat mereka yang komprehensif, menggabungkan dalil *naqli*, kias, maslahat, dan ‘urf. Pendapat Mālik bin Anas al-Asbahī disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah*.⁵⁰

a. Kias

وَكُلُّ امْرَأَةٍ كَانَتْ أَيَّامُهَا أَقْلَى مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنَّهَا تَسْتَظْهُرُ بِثَلَاثٍ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ

Artinya:

Setiap wanita yang masa haid biasanya kurang dari 15 hari, maka ia melakukan *istizhār* (kehati-hatian) sebanyak 3 hari agar mencapai 15 hari.

Wajh al-Istidlāl: Dalil ini menunjukkan metode kias *iḥtiyāṭī* (analogi kehati-hatian) yang khas dari Mazhab Maliki, yaitu *istizhār* untuk meluaskan rentang haid hingga mencapai batas maksimal 15 hari. Tujuannya agar wanita tidak terburu-buru menetapkan status suci yang keliru.

b. Amalan Penduduk Madinah

قَالَ سَاهُنُونُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ: كَمْ تَرُكُ الصَّلَاةَ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ قَالَ سَالِمٌ: تَرُكُ الصَّلَاةَ حَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، قَالَ: ثُمَّ تَعْتَسِلُ وَتُصَلِّي

Artinya:

Sahnūn meriwayatkan dari Nāfi‘, dari ‘Āsim bin ‘Umar, dari Abū Bakr bin ‘Umar, dari Sālim bin ‘Abdillāh, bahwa ia pernah ditanya: Berapa malam wanita *mustaḥādah* meninggalkan salat? Sālim menjawab: Ia meninggalkan salat selama 15 malam, lalu ia mandi dan salat.

Wajh al-Istidlāl: Riwayat ini memperlihatkan otoritas ‘*amal ahlu al-Madīnah* dalam Mazhab Maliki, yang dianggap sebagai ijmak praktis dari generasi tabiin dan ahli fikih Madinah. Ketetapan batas 15 malam bersumber dari fatwa para ulama besar Madinah, seperti Sālim bin ‘Abdillāh, yang dijadikan hujah kuat.

⁵⁰Mālik bin Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah*, juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). h. 151.

c. *Al-Maṣlahah al-Mursalah.*

وَإِنْ تَطَاوَلَ إِلَيْهَا الدَّمُ الْأَشْهُرَ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي ذَلِكَ دَمًا لَا تَشْكُ وَتَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ دَمٌ حَيْضَةٍ
فَلْتَكُفَّ عَنِ الصَّلَاةِ

Artinya:

Dan jika darah terus-menerus keluar darinya selama berbulan-bulan, maka (ia tetap wajib salat dan dihukumi *mustahādah*) kecuali bila ia melihat darah yang ia tidak ragu lagi dan yakin bahwa itu adalah darah haid, maka hendaklah ia meninggalkan salat ketika itu.

Wajh al-Istidlāl: Penetapan batas maksimal masa haid melalui pendekatan *istidlāl* seperti: untuk menghindari kebingungan pada wanita, mencegah terlalu lamanya meninggalkan salat, serta mempertimbangkan kemungkinan darah yang terus-menerus keluar, merupakan bentuk penerapan *Al-Maṣlahah al-Mursalah*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah beban taklif yang berlebihan dan menjaga ketetapan serta kestabilan hukum syariat.

d. ‘Urf

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا تَقْعُدُ أَيَّامَ لِدَاتِهَا عَنْ مَالِكٍ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا تُحِبِّسُ النِّسَاءُ الدَّمَ حَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً

Artinya:

Dan telah dikatakan: Sesungguhnya wanita yang mengalami darah terus-menerus duduk (tidak salat) selama jumlah hari kebiasaan teman-teman seangkatannya (*lizātihā*), menurut Imam Mālik, karena maksimal waktu darah tertahan pada wanita adalah 15 malam.

Wajh al-Istidlāl: Ini adalah bentuk istinbat dengan memperhatikan kebiasaan biologis wanita secara umum. Artinya, batas 15 malam bukan dari nas tekstual, tapi dari pengalaman empiris.

4. Bab Tayamum

Pandangan Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi tentang Apakah Disyaratkan Masuknya Waktu Salat untuk Bolehnya Bertayamum

Boleh bertayamum untuk salat sunah pada setiap waktu yang tidak dilarang untuk melaksanakan salat padanya. Dan boleh bertayamum untuk salat yang terlewat (*qadha'*) pada waktu kapan pun. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan tayamum untuk salat fardhu sebelum masuk waktunya. dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kāsānī menyebutkan dalam kitabnya *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*

فَالْأَوْقَاتُ كُلُّهَا وَقْتٌ لِلتَّيَمُّمِ حَتَّى يَجُوزَ التَّيَمُّمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَقَبْلَ دُخُولِهِ، وَهَذَا
عِنْدَ أَصْحَابِنَا⁵¹

Artinya:

⁵¹ Abū Bakr bin Mas‘ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, juz 1 (Cet. I; Mesir: Matba‘ah Sharikah al-Maṭbū‘at al-‘Ilmiyyah, 1327 H/1909 M), h. 54.

Maka seluruh waktu adalah waktu untuk tayamum, sehingga diperbolehkan bertayamum setelah masuk waktu salat maupun sebelum masuk waktu salat dan ini adalah pendapat ulama-ulama Mazhab Hanafi.

2. Pendapat Mazhab Maliki

Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Hafid menyebutkan dalam kitabnya *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ اشْرَاطُ دُخُولِ الْوَقْتِ فَمِنْهُمْ مَنِ اشْرَطَهُ، وَهُوَ مَذَهَبُ الشَّافِعِيِّ
وَمَالِكٍ⁵²

Artinya:

Adapun masalah ketiga, yaitu syarat masuknya waktu (salat) maka sebagian dari mereka mensyaratkannya (Masuknya Waktu Salat Untuk Bolehnya Bertayamum) dan ini adalah Mazhab Syafii dan Mālik.

Metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi Tentang Apakah Disyaratkan Masuknya Waktu Salat Untuk Bolehnya Bertayamum

1. Metode Istinbat Mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi membolehkan tayamum sebelum masuk waktu salat, karena mereka memandang sebab (ilat) tayamum adalah ketiadaan air, bukan waktu salat. Ini didasarkan pada nash Al-Qur'an yang mutlak, hadis yang mendukung kelonggaran, dan analogi hukum dengan wudu. Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī menyebutkan dalam kitabnya *al-Mabsut*.⁵³

a. Al-Qur'an

Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī menyebutkan dalam kitabnya *al-Mabsut*

سَنَتِلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا

Artinya:

kami berdalil dengan firman Allah Swt. maka jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang bersih (suci).

Wajh al-Istidlāl: Allah hanya mensyaratkan tidak adanya air tanpa menyebut waktu salat. Maka bertayamum boleh dilakukan sebelum masuk waktu karena syaratnya hanya ketiadaan air. Tidak ada syarat waktu salat dalam ayat; hanya syarat ketiadaan air. Maka tayamum boleh kapan saja saat air tidak ada.

b. Kias

ثُمَّ التَّوْضُؤُ بِالْمَاءِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِتَقْرِيرِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْحَدَثُ فَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ

Artinya:

Kemudian sebagaimana berwudu dengan air boleh dilakukan sebelum masuk waktu salat karena sebabnya yaitu hadas sudah tetap, maka demikian pula tayamum.

⁵²Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, juz 1 (Cet. Cairo: Dār al-Ḥadīth, 1425 H/2004 M). h. 73.

⁵³Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsī, *Al-Mabsut*, (Cet. Bairut: Dar Al-Marafiq, t.t), h. 109-111.

Wajh al-Istidlāl: Persamaan sebab antara tayamum dan wudu (keduanya bentuk taharah pengganti hadas). Kias *ta 'līlī* berbasis *'illah syar'iyyah* yang sudah tetap sebelum waktu salat.

2. Metode Istinbat Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa tayamum hanya sah dilakukan setelah masuk waktu salat, sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk mencegah penyalahgunaan rukhsah. Pendalilan mereka kuat pada sunah *taqrīriyyah*, amalan penduduk Madinah, dan pendekatan *saddu al-Žarā'i* serta 'urf Mālik bin Anas al-Asbahī menyebutkan dalam kitabnya *al-Mudawwanah*.⁵⁴

a. Hadis

فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: لِلَّذِي أَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ لِلَاخَرِ: تَمَّ صَلَاتُكَ

Artinya:

Lalu hal itu disebutkan kepada Rasulullah saw. Maka beliau berkata kepada orang yang mengulang salatnya: Engkau mendapat pahala dua kali. Dan kepada yang tidak mengulang, beliau berkata: Salatmu telah sempurna dan sah.

Wajh al-Istidlāl: Dalam hadis, Nabi Muhammad saw. menyetujui salat seseorang yang tayamum setelah masuk waktu, dan tidak menyuruh mengulang. Menunjukkan bahwa tayamum cukup dan sah jika dilakukan pada waktunya. Tidak disebut adanya sah tayamum sebelum waktu salat.

5. Bab Bersuci dari Najis

Pandangan Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi tentang Hukum Perintah Menghilangkan Najis.

Para ulama sepakat, berdasarkan dalil-dalil yang didengar (dari syariat), bahwa menghilangkan najis diperintahkan dalam syariat. Namun mereka berselisih pendapat: apakah perintah tersebut bersifat wajib, atau bersifat anjuran (*Mandūb*).

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Imam Burhān al-Dīn al-Marghīnānī menyebutkan dalam kitabnya *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*

تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه» لقوله تعالى: وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ⁵⁵

Artinya:

Membersihkan najis adalah wajib dari tubuh orang yang salat, pakaianya, dan tempat yang digunakan untuk salat, berdasarkan firman Allah Swt. Dan pakaianmu, maka bersihkanlah.

2. Pendapat Mazhab Maliki

⁵⁴Mālik bin Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah*, juz 1 (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M). h. 145-147.

⁵⁵Ali bin Abi Bakar al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarḥ Bidāyat al-Mubtadi*, juz 1 (Cet. Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.). h. 36.

'Ubaidullah bin al-Husain Ibn al-Jallāb al-Mālikī menyebutkan dalam kitabnya *At-Tafrī' fī Fiqh al-Imām Mālik bin Anas*.

إزالة التجasse عن التوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة إلا أن تكون في أعضاء الوضوء
فتجب إزالتها، لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها⁵⁶

Artinya:

Menghilangkan najis dari pakaian, tubuh, dan tempat (salat) hukumnya sunnah, bukan wajib, kecuali jika najis tersebut berada pada anggota wudu, maka wajib dihilangkan, karena tidak sah menyucikan anggota wudu apabila najis masih terdapat padanya.

Metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi Tentang Hukum Perintah menghilangkan Najis.

1. Metode Istinbat Mazhab Hanafi.

Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Hafid menyebutkan dalam kitabnya *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*.⁵⁷

- a. Al-Qur'an

اختلفُمْ فِي قَوْلِهِ وَثِيَابِكَ فَطَهِرْ هَلْ ذَلِكَ حَمْوُلٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ حَمْوُلٌ عَلَى الْمَجَازِ

Artinya:

Perbedaan mereka para ulama dalam firman Allah ° وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ° apakah ayat tersebut dipahami secara hakiki (harfiah) atau secara majazi (kiasan).

Wajh al-Istidlāl: Perintah Allah dianggap sebagai dalil atas kewajiban menghilangkan najis dari pakaian yang digunakan untuk salat, karena perintah itu datang dalam bentuk amar yang menunjukkan tuntutan. Ayat ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai perintah membersihkan najis secara hakiki, bukan sekadar perintah menyucikan jiwa (majazi).

- b. Kias

وَإِذَا وَجَبَ التَّطْهِيرُ بِمَا ذَكَرْنَا فِي التَّوْبِ وَجَبَ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ، فَإِنَّ الْاسْتِعْمَالَ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ يَشْتَأْلُ الْكُلَّ

Artinya:

Jika kewajiban menyucikan (najis) berlaku atas pakaian, maka berlaku pula atas badan dan tempat (salat), karena penggunaan (tempat, badan, pakaian) dalam salat mencakup semuanya.

Wajh al-Istidlāl: Analogi dilakukan antara pakaian, badan, dan tempat. Ketiganya digunakan dalam salat, maka kewajiban menghilangkan najis juga berlaku pada semuanya secara merata.

- c. Istihsan

⁵⁶ 'Ubaidullah bin al-Husain Ibn al-Jallāb al-Mālikī, *At-Tafrī' fī Fiqh al-Imām Mālik bin Anas*, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428 H/2007 M). h. 27.

⁵⁷ Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī al-Maghīnānī, *al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, juz 1 (Cet. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.). h. 36-37.

وإِذَا أَصَابَ الْحُفَّ تَجَاسَةً لَهَا جِرْمٌ كَالرَّوْثِ وَالعَذِيرَةِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ فَجَفَّتْ فَدَلَكَهُ بِالْأَرْضِ جَازَ،
وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ

Artinya:

Apabila sepatu kulit terkena najis yang memiliki benda (berwujud) seperti kotoran hewan, tinja, darah, atau mani, kemudian najis itu mengering, lalu digosokkan ke tanah, maka itu boleh. Dan ini termasuk *istihsān*.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا مَسَحَهُ بِالْأَرْضِ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ أَثْرُ النَّجَاسَةِ يَطْهُرْ لِعُمُومِ الْبَلْوَى

Artinya:

Dan dari Abū Yūsuf bahwa jika seseorang mengusap (najis tersebut) di tanah hingga tidak tersisa bekas najis, maka (benda itu) menjadi suci, karena (berdasarkan) keumuman bencana (*'umūm al-balwā'*).

Wajh al-Istidlāl: Ini adalah bentuk rukhsah berdasarkan keumuman kesulitan (*'umūm al-balwā'*). Mengingat penggunaan sepatu di luar rentan najis, maka *istihsān* digunakan sebagai metode pelonggaran hukum demi kemudahan dalam kondisi umum.

2. Pendapat Mazhab Maliki.

Muhammad ibn Ahmad ibn 'Arafah al-Dusūqī al-Mālikī menyebutkan dalam kitabnya *Hāshiyat al-Dusūqī 'alā al-Syarh al-Kabīr*.⁵⁸

a. Kias.

فَمَنْ اكْتَحَلَ بِمَرَأَةِ خَنْزِيرٍ غَسَلَ دَاخِلَ عَيْنَيْهِ إِنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَّاً بِالْغَسْلِ، وَإِلَّا كَانَتْ مَعْجُوزًا
عَنْهَا، لَمْ (يَجِدْ) مِنِ الْبَاطِنِ

Artinya:

Barang siapa memakai celak dari empedu babi, maka ia wajib membasuh bagian dalam matanya jika tidak dikhawatirkan ada bahaya dari mencucinya. Namun jika dikhawatirkan bahaya, maka hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak mampu dilakukan, maka tidak wajib menghilangkannya dari bagian dalam tubuh.

Wajh al-Istidlāl: Diterapkan kias antara najis *zāhir* (luar) dan najis *bātin* (dalam tubuh seperti mata). Disyaratkan penghilangan najis jika tidak menimbulkan *mađarrāh* (bahaya), menunjukkan pendekatan *'aqlī maṣlahī* khas *Mālikiyah*.

b. *Maqāṣid al-Syari'ah*

فَكَذَلِكَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْمُخَاطِبُ بِهَا الصَّغِيرُ لَا وَلِيُّهُ، لَكِنْ لَيْسَ مُخَاطِبًا بِهَا عَلَى سَيِّلِ الْوُجُوبِ
أَوْ السُّنْنَةِ كَخُطَابِ الْبَالِغِ الْمَذْكُورِ هُنَّا، بَلْ عَلَى سَيِّلِ النَّدْبِ فَقَطَ

Artinya:

Demikian pula penghilangan najis: yang menjadi *mukhāṭab* (yang dituju oleh *khitāb*) adalah anak kecil, bukan walinya. Namun ia tidak ditujukan (diperintahkan) untuk itu dalam bentuk kewajiban atau kesunahan sebagaimana

⁵⁸ Muhammad ibn Ahmad ibn 'Arafah al-Dusūqī al-Mālikī, *Hāshiyat al-Dusūqī 'alā al-Syarh al-Kabīr*, juz 1 (Cet. Bairut: Dār al-Fikr, t.th.). H. 66.

orang dewasa yang disebutkan di sini, melainkan hanya dalam bentuk anjuran (*mandūb*) saja.

Wajh al-Istidlāl: Tujuannya adalah pendidikan terhadap kesucian dan pembiasaan anak-anak dalam ibadah. Ini memperlihatkan aspek tarbiyah dan tahdhīb, bagian dari maqāṣid al-shari‘ah. Penetapan status *mandūb* (anjuran) dalam konteks anak kecil didasarkan pada pendekatan *maṣlahah* dan tarbiah. *Maqāṣid* yang dituju di sini adalah *tathīr* (pembiasaan suci) dan *ta‘līm al-atfāl*.

c. *Istidlāl* dengan *Khithāb al-Wad'* (Pendekatan *Syarīyyah* dan *Ma‘nā Maṭlūb*)

أَيْ فِالْخُطَابُ بِهَا خُطَابٌ وَضِعُّ، وَحِينَئِذٍ فَيُخَاطَبُ بِهَا الصَّيْءُ لَا الْوَائِي وَهُوَ خُطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ
بِجَعْلِ الشَّيْءِ سَبَبًا أَوْ شَرْطًا أَوْ مَانِعًا، كَجَعْلِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ

Artinya:

Ini adalah *khiṭāb wad'*, yakni hukum syariat ini masuk dalam kategori *khiṭāb wad'*, sehingga subjek yang dituju (yang dikenai hukum ini) adalah anak kecil, bukan walinya. *Khitāb wad'* adalah firman Allah Swt. yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang suatu hukum. Misalnya, penetapan taharah (kesucian) sebagai syarat sahnya salat.

Wajh al-Istidlāl: Mazhab Maliki menyebut bahwa penghilangan najis (taharah *al-Khabaṣ*) masuk dalam *khiṭāb al-wad'*, yaitu sebagai syarat sah ibadah, seperti salat dan tawaf. Ini bukan semata-mata perintah *taklīf*, tapi karena berhubungan langsung dengan sah tidaknya ibadah. Maka ia adalah syarat syariat.

KESIMPULAN

Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki memiliki karakteristik dan pendekatan yang khas, meskipun keduanya tetap berpijak pada sumber-sumber hukum Islam yang disepakati, seperti Al-Qur'an, Sunah, ijma'k, dan kias. Mazhab Hanafi mengedepankan metode rasional yang sistematis dalam penetapan hukum, khususnya saat nas eksplisit tidak tersedia. Proses istinbat dimulai dari Al-Qur'an dan hadis saih, dilanjutkan pendapat sahabat, dan jika belum ditemukan jawaban, digunakan kias serta istihsān. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian tinggi dalam menerima hadis, dengan preferensi utama pada hadis mutawatir, namun hadis *āḥād* juga diterima dengan syarat diperiksa keadilan perawi dan konteks hukumnya. Selain itu, dalam kondisi tertentu, adat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sementara itu, Mazhab Maliki, sangat menekankan amal penduduk Madinah sebagai otoritas hukum, karena dipandang mewarisi praktik Nabi saw. dan para sahabat. Selain itu, mazhab ini mengadopsi *maṣlahah mursalah*, *istihsan*, dan *saddu al-Żarā'i* dalam ijtihad, sehingga lebih kontekstual dan berorientasi kemaslahatan. Mazhab Hanafi mengutamakan pendekatan rasional dan argumentatif dalam merumuskan hukum. Perbedaan metodologi keduanya mencerminkan keluasan khazanah istinbat fikih Islam, yang tetap berpijak pada sumber hukum saih dan merespons kebutuhan umat lintas zaman. Memahami perbedaan metode istinbat ini sangatlah penting, supaya tidak muncul sikap fanatisme terhadap Mazhab tertentu, melainkan dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi dalam pelaksanaan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahnya

Buku

- al-Dusūqī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Arafah. *Hāshiyat al-Dusūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Kalbī, Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad ibn Juzzayy. *Taqrīb al-Wuṣūl ilá ‘Ilm al-Uṣūl*. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas‘ūd. *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘*, Juz 1. Miṣr: Matba‘at Sharikat al-Maṭbū‘at al-‘Ilmiyyah, 1327 H.
- al-Marghīnānī, ‘Alī ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Jalīl al-Farghānī. *al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 1. Beirut: Dār Ihyā‘ al-Turāth al-‘Arabī, t.th.
- al-Maqdisī, ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah. *Al-Mugnī*. Ed. ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin al-Turkī dan ‘Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Hulū, Juz 1. Cet. 3; Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- al-Qarāfī, Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Idrīs. *Sharḥ Tanqīh al-Fuṣūl fī ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz 2. Cet. risālah ‘ilmīyyah: Fakultas Syariah Universitas Umm al-Qurā, 1421 H/2000 M.
- al-Sarakhsī, Abū Bakr. *Uṣūl al-Sarakhsī*. Beirut: Dār Ma‘rifah, 1993.
- al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad. *al-Mabsūt*, Juz 1. Mesir: Matba‘at al-Sa‘ādah, t.t.
- al-Sabtī, ‘Iyād bin Mūsā al-Yahṣubī. *Tartīb al-Madārik wa-Taqrīb al-Masālik*. Taḥqīq: Ahmad Bakr Maḥmūd, Juz 1. Bayrūt: Dār Maktabat al-Ḥayāh, 1387 H/1967 M.
- al-Shīrāzī, Ibrāhīm bin ‘Alī. *Ṭabaqāt al-Fuqahā‘*. Dihimpun dan diringkas oleh Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manzūr. Taḥqīq: Iḥsān ‘Abbās. Cet. 1; Bayrūt: Dār al-Rā’id al-‘Arabī, 1390 H/1970 M.
- al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Anas, Mālik. *al-Muwaṭṭa‘*. Taḥqīq: Muḥammad Muṣṭafā al-A‘ẓamī. Cet. 1; Abū Ḥabīb Mu’assasat Zāyid ibn Sultān Āl Nahyān, 1425 H/2004 M.
- Anas, Mālik. *al-Mudawwanah*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Ibn ‘Atīyyah, Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥaqq. *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 H.
- Ibn Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 1. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth, 1425 H/2004 M.
- al-Yamārī, Ibrāhīm ibn Farhūn. *al-Dībāj al-Mudhab fī Ma‘rifat A‘yān ‘Ulamā‘ al-Madhhab*, Juz 2. Taḥqīq dan ta‘līq: Muḥammad al-Āḥmadī Abū al-Nūr. al-Qāhirah: Dār al-Turāth, t.th.
- Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-‘Arab*, Juz 7. Cet. 3; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Muslim, Abū al-Ḥusayn. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1. Cet. I; Bayrūt: Dār Ṭawq al-Najāt, 1433 H.
- Nugroho, M. Yusuf Amin. *Fiqh Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*. Wonosobo: E-book, 2012.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2024.
- Zuhaily Wahbah, Ushul Fiqh Al-Islamiy, Juz 1 (Cet: I; Damaskus: Dar al Fikr, 1406 H/1986 M), **Jurnal, Disertasi, Tesis, dan Skripsi:**
- Abshor, M. Ulil. "Metode Istimbath Hukum dalam Pandangan Ulama Hanafiah."

- Contemplate: Jurnal Ilmiah Studi Keislaman* 3.02 (2022): 16-31.
- Adiah, Halimatus, and Muhammad Sibawaih. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik." *Jurnal Cerdas Hukum* 1.1 (2022): 89-99.
- Nazela, Nabel Salma, and Nor Aliya Rahmi. "Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab." *Islamic Education* 1.1 (2023): 67-89.
- Ningrat, Dewi Mustika. "Wakaf Uang Dalam Perspektif Mazhab Hanafi", *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020.
- Saputra, Riki Dian. "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf." *Pa-Bengkayang. Go. Id* 4.1 (2021): 1-19
- Wijayanti, Ratna, and M. Meftahudin. "Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh tentang produk halal, metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan hukum produk halal." *International Journal Ihya 'Ulum al-Din* 20.2 (2018): 241-268.